NASIB UU PEMILU DAN MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA

OLEH: H. MOHAMAD MURAZ, SH.,MM

ANGGOTA KOMISI II DPR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

UU PEMILU NO 7 TAHUN 2017

- PEMILU 2019 BERDASARKAN UU TERSEBUT UNTUK PERTAMAKALINYA PILPRES DAN PILEG DI LAKUKAN SERENTAK DAN PARLEMEN TRESHOLD MENJADI 4% SERTA PRESIDEN TRESHOLD 20%
- SISTEM PEMILU MASIH PROPORSIONAL TERBUKA
- PERTAMA KALINYA HANYA ADA DUA CALON PRESIDEN. MENURUT PENGAMAT TELAH TERJADI PEMBELAHAN MASYARAKAT YANG BERDAMPAK KURANG BAIK.
- CAPRES DINYATAKAN MENANG BILA MEMPEROLEH SUARA 50%+1 DAN HARUS MEMPEROLEH SEKURANG-KURANGNYA 20% SUARA DI LEBIH DARI SETENGAH PROVINSI DI INDONESIA.

URGENSI PERUBAHAN UU PEMILU

- PEMILU LIMA KOTAK TAHUN 2019 MENIMBULKAN KOMPLEKSITAS, TINGGINYA SUARA TIDAK SAH DAN SUARA TERBUANG. LEBIH DARI 800 PETUGAS KPPS MENINGGAL DUNIA DAN LEBIH DARI 5000 ORANG MENGALAMI SAKIT.
- ADANYA PUTUSAN MK NOMOR 55/PPU-XII 2019 TENTANG REKONSTRUKSI KESERENTAKAN PEMILU BERIKUTNYA.
- KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU YANG CENDERUNG BELUM BERIMBANG DALAM MEMBANGUN POSISI DAN RELASI ANTARA KPU, BAWASLU, DAN DKPP.

- PEMILU SERENTAK PRESIDEN, PILEG , DAN DPRD KEMUDIAN DISUSUL OLEH PILKADA PADA TAHUN YANG SAMA AKAN MENJADI BEBAN YANG BERAT BAGI PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH, PARTAI POLITIK, DAN MASYARAKAT PEMILIH.

PILKADA 2024

- TAHAPAN PEMILU KADA AKAN BERIRISAN BANYAK DENGAN PILPRES DAN PILEG, DIKHAWATIRKAN PENYELENGGARA PEMILU DAN MASYARAKAT MENJADI TIDAK FOKUS.
- PEMILU SERENTAK 2024 DENGAN WAKTU YANG BERDEKATAN AKAN MEMBUAT KUALITAS DEMOKRASI MENURUN, KARENA PUBLIK TIDAK PUNYA WAKTU BANYAK UNTUK MEMILIH DAN MEMILAH CALON YG BERKUALITAS .
- TAHUN 2022 DAN 2023 AKAN TERJADI KEKOSONGAN 278 KEPALA DAERAH SE-INDONESIA DAN AKAN DI ISI OLEH PEJABAT KEPALA DAERAH DENGAN MASA YG CUKUP LAMA YAITU LEBIH DARI 2 TAHUN.

- TAHUN 2024 AKAN ADA 270 PLT KEPALA DAERAH
- JABATAN PJ YANG TERLALU LAMA DENGAN KEWENANGAN TERBATAS AKAN BERDAMPAK TERHADAP PENURUNAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH.
- DENGAN ADANYA 548 PJ DAN PLT PATUT DI DUGA BERINDIKASI KUAT AKAN SEMAKIN MEMPERKUAT REZIM PEMERINTAH YANG BERKUASA
- ANGGARAN NASIONAL (APBN) DAN ANGGARAN DAERAH (APBD) AKAN TERSEDOT SANGAT BANYAK DALM PELMILU TAHUN 2024 DAN MENGHAMBAT PEMBANGUNAN PADA TAHUN TERSEBUT.

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

- MENURUT LAPORAN THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) INDEK DEMOKRASI INDONESIA MENCATAT SKOR TERENDAH DALAM 14 TAHUN TERAKHIR DENGAN SKOR SEBELUMNYA 6,48 MENJADI 6,3. (DI BAWAH MALASIA, TIMOR LESTE DAN PHILIPINA).
- ADA KEKHAWATIRAN MASYARAKAT UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN MENGKRITIK PEMERINTAH.
- PEMILU SERENTAK 2024 DI KHAWATIRKAN MENURUNKAN LAGI INDEK DEMOKRASI INDONESIA.

SARAN DAN PENDAPAT

- PEMILU MERUPAKAN SARANA TERPENTING DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN DPR RI UNTUK MEMPERSIAPKAN PERUNDANG UNDANGAN YANG MEMBERIKAN KENYAMANAN KEPADA PENYELENGGARA DAN SELURUH RAKYAT PEMILIH.
- REVISI UU PEMILU SUDAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2020 DAN SUDAH DI LAKUKAN PEMBAHASAN OLEH KOMISI II DPR RI, MAKA KETIDAK KONSISTENAN PEMERINTAH DAN PARTAI PENDUKUNG YANG MENOLAK MELANJUTKAN REVISI UU PEMILU MENJADI TANDA TANYA BESAR .

- PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DEFINITIF DENGAN PJ ATAU PLT KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN TERBATAS TENTU SANGAT BERBEDA. KARENA PJ DAN PLT TENTU AKAN LEBIH PATUH KEPADA YANG MENGANGKATNYA.
- SEBAIKNYA PEMERINTAH DAN DPR BERDISKUSI DENGAN PARA AHLI, PARA AKEDIMISI, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA MENGENAI PERLU TIDAKNYA REVISI UU PEMILU DAN UU PILKADA.
- LAKUKAN SURVEY KESEDIAN MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN PEMILU SERENTAK 2024.
- UU OMNIBUSLAW CIPTA KERJA SUDAH DI TETAPKAN, APA SALAHNYA KITA MEMBUAT OMNI BUSLAW UU PEMILU.